



Legislatif Dorong Jargon “Yogyakarta Berhati Nyaman” Jadi Nyata

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta selama ini begitu masyhur dengan semboyan Berhati Nyaman (bersih, sehat, indah dan nyaman). Akan tetapi, apakah jargon tersebut benar-benar sudah dirasakan warga masyarakatnya? atau, hanya jadi romantisme semu dan angan-angan belaka?

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto dalam diskusi “DPRD Menyapa: Menuju Kota Yogya Berhati Nyaman”, Kamis (4/8), menjelaskan, tolok ukur nyaman antar warga memang tidak dapat diseragamkan, sehingga pasti ada dinamika saat membahasnya.

“Dalam membahas konteks nyaman, selain aspek pribadi, terdapat pula aspek kenegaraan. Nah, nyaman sebagai warga negara, serta nyaman sebagai pribadi, sebisa mungkin, itu harus saling beriringan, jalan bareng,” katanya.

Untuk menjamin keselarasan tersebut, ungkapnya, Pemkot Yogyakarta, sebagai pemangku kepentingan harus dapat menjamin hak-hak rakyat selaras peran, dan fungsinya. Namun, ia mengapresiasi berbagai langkah eksekutif, mengenai pe-



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

DISKUSI - Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto (kiri) dalam diskusi “DPRD Menyapa: Menuju Kota Yogya Berhati Nyaman”, Kamis (4/8).

menuhan hak-hak dasar tersebut.

Salah satunya, soal hak kesehatan yang mutlak menjadi kebutuhan warga masyarakat. Menurutnya, Pemkot sudah memberi jaminan untuk menanggung seluruh iuran BPJS penduduknya melalui APBD. Sehingga, dengan UMK yang cenderung minim, beban kesehatan bisa terduksi.

“Biaya BPJS tidak menjadi problem warga Kota Yogya karena sudah

dibiayai APBD. Kalau, di luar Kota Yogya, ketika ada isu iuran BPJS naik, pasti ribut-ribut. Sementara di sini nggak pernah karena sudah dibiayai APBD,” tegasnya.

Setali tiga uang, di sektor pendidikan upaya eksekutif juga patut diapresiasi. Bagaimana tidak, sesuai kewenangannya, biaya pendidikan SD dan SMP negeri di Kota Pelajar benar-benar digratiskan secara penuh. Sementara anak yang seko-

lah di swasta, dipastikan tetap dapat perhatian.

“Untuk swasta Pemkot sudah menyediakan JPD (Jaminan Pendidikan Daerah). Jadi, kalau ada warga yang kesulitan bayar, meski sekolah di swasta, kami sudah mempersiapkan mekanisme agar bisa dibiayai APBD,” cetusnya.

Politikus PDI Perjuangan itu pun berujar, dalam aspek pelayanan publik, Kota Yogyakarta memang nyaris tanpa cacat. Namun, di balik kenyamanan itu, ada deretan konflik sosial yang masih menganga. Mulai dari klitih, atau kejahatan jalanan, sampai gesekan antar warga dengan latar belakang permusuhan supporter.

“Kalau kita memakai pendekatan sosial kemasyarakatan, itu jadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat dan aparat keamanan. Kasus terakhir yang viral kemarin, aparat kepolisian kecolongan, padahal provokasinya dari rombongan,” tandasnya.

Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan hotel dan toko berjejaring yang begitu masif di Kota Yogyakarta juga punya potensi menimbulkan konflik sosial. (**aka/ord**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005